

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Uni Eropa adalah organisasi antar-pemerintahan dan supranasional, yang beranggotakan negara-negara Eropa. Sejak 1 Juli 2013 Uni Eropa telah memiliki 28 negara anggota. Persatuan ini didirikan di bawah Perjanjian Uni Eropa, yang lebih dikenal dengan Perjanjian Maastricht, pada tahun 1992.

Uni Eropa bekerja melalui gabungan sistem supranasional dan antar pemerintahan. Di beberapa bidang, keputusan-keputusan ditetapkan melalui musyawarah dan mufakat di antara negara-negara anggota, dan di bidang-bidang lainnya lembaga-lembaga organ yang bersifat supranasional menjalankan tanggung jawabnya tanpa perlu persetujuan anggota-anggotanya. Lembaga-lembaga penting di dalam UE adalah Komisi Eropa, Dewan Uni Eropa, Dewan Eropa, Mahkamah Eropa, dan Bank Sentral Eropa. Di samping itu, terdapat pula Parlemen Eropa yang anggota-anggotanya dipilih langsung oleh warga negara anggota.¹

Uni Eropa dibentuk karena adanya kesadaran dari negara-negara anggota untuk membentuk suatu organisasi. Mereka melihat adanya efek negatif dari perang dunia I dan II dan pengalaman semasa perang tersebut

¹ Staab, Andreas, 2008, *The European Union Explained*, USA, Indiana University Press.

membuat negara-negara Eropa ingin melakukan usaha dan penyelamatan untuk menghindari perang di masa yang akan datang.

Pada awal pembentukan kerjasama ekonomi di negara-negara Eropa hanya 6 negara yang ikut berpartisipasi. Keenam negara tersebut adalah Belgia, Jerman, Perancis, Italia, Luxembourg dan Belanda, yang kemudian keenam Negara tersebut dianggap sebagai Negara-negara pendiri Uni Eropa.

Selain dari pengalaman buruk saat perang, Uni Eropa sendiri merupakan suatu organisasi yang berupaya menyatukan potensi dari masing masing negara anggota untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran. Pada tahun 1992 Perjanjian Maastricht di Roma dan terjadi pula pembentukan pasar bersama atau pasar tunggal dan penyatuan militer yang diharapkan dapat meningkatkan perdagangan antar negara-negara Eropa.

Negara- Negara Uni Eropa sepakat untuk mempunyai kebijakan perdagangan tunggal dan menjadikan kebijakan perdagangan sebagai sebuah kewenangan eksklusif Uni Eropa. Hanya Uni Eropa yang dapat membuat perundang-undangan tentang perdagangan dan menandatangani perjanjian-perjanjian perdagangan internasional. Ruang lingkup kewenangan eksklusif UE tersebut tidak hanya mencakup perdagangan barang, tetapi juga mencakup jasa, aspek-aspek komersial dari kekayaan intelektual dan penanaman modal asing. Uni Eropa memiliki kewenangan

eksklusif dalam beberapa bidang lainnya yang mungkin juga relevan dengan kebijakan perdagangan, seperti transportasi, pergerakan modal, dll.²

Pada tanggal 1 Januari 1999. Penyatuan pasar bersama diluncurkan. Beberapa bulan sebelumnya pada tanggal 1 Juni 1998 dilimpahkan kepada Bank sentral Eropa(ECB)

Pasar tunggal mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2002 dengan penyatuan mata uang dari 12 negara anggota UE menjadi Euro. Adapun 12 negara itu adalah Austria, Belgia, Belanda, Finlandia, Irlandia, Italia, Jerman, Luksemburg, Perancis, Portugal, Spanyol, dan Yunani. Penyatuan mata uang ini berlangsung mulus dan tidak menyebabkan gejolak harga yang signifikan. Tiga negara anggota Uni Eropa, yaitu Inggris, Denmark dan Swedia, belum berpartisipasi.

Economic and Monetary Union (EMU). EMU merupakan perwujudan dari pasar tunggal (single market)dari negara-negara Eropa. Kebijakan perekonomian EMU terdiri dari tiga komponen, yaitu setiap negara anggota diharuskan untuk mengkoordinasikan setiap kebijakan perekonomian, menyediakan pengawasan multilateral atas koordinasi kebijakan perekonomian, dan merupakan subyek dari ketetapan dan disiplin dari finansial dan anggaran. Tujuan dari kebijakan moneter adalah untuk menciptakan sebuah mata uang bersama dan untuk memastikan

²Profil Perdagangan

http://eeas.europa.eu/delegations/indonesia/eu_indonesia/trade_relation/trade_profiles/index_id.htm

stabilitas mata uang. Hal ini telah disebutkan dalam Perjanjian Maastricht tercantum kriteria konvergensi (convergence criteria). Kriteria Konvergensi merupakan sebuah mekanisme makroekonomi untuk menilai kesiapan negara anggota dalam memakai mata uang Euro dan masuk kedalam European Monetary Union (EMU) serta menjaga kestabilannya pasca EMU. Kriteria Konvergensi terdiri dari 5 ketentuan yang mengatur kondisi ekonomi makro, sektor moneter dan fiskal, negara anggotanya.³

Disamping Kriteria Konvergensi, dalam Perjanjian Maastricht mencantumkan Pakta Stabilitas dan Pertumbuhan atau Stability and Growth Pact. Stability and Growth Pact (SGP) bertujuan untuk memfasilitasi dan menjaga kestabilan dari EMU pasca diperkenalkannya mata uang euro. SGP merupakan kebijakan yang dibuat untuk diterapkan pada semua negara anggota UE, melengkapi kriteria konvergensi dari EMU yang telah dibentuk sebelumnya. Secara garis besar fungsi SGP adalah memantau kondisi fiskal dari negara-negara anggota agar tetap terjaga sesuai dengan ketentuan dalam Kriteria Konvergensi. Melalui keunggulan yang ditawarkan tersebut memungkinkan negara anggota yang telah terintegrasi secara ekonomi akan mengalami perubahan kondisi perekonomian sebagai akibat dari penyesuaian terhadap sistem dan regulasi perekonomian yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan sistem perekonomian bersama akan melindungi setiap negara anggotanya dari setiap kemungkinan akan terjadinya krisis perekonomian. Kejatuhan

³ Afxentiou, Panos C. 2000. Convergence, the Maastricht Criteria, and Their Benefits. University of Calgary.

perekonomian suatu negara akan berdampak terhadap perekonomian negara lain yang tergabung di dalam institusi regional yang terkait.

Pada penghujung tahun 2008 terjadi peristiwa yang mengguncang Eropa. Peristiwa itu adalah krisis keuangan Eropa yang mengancam perekonomian dunia. Krisis keuangan atau sering disebut krisis ekonomi adalah situasi di mana ekonomi dari suatu negara mengalami penurunan yang disebabkan oleh suatu krisis keuangan. Krisis keuangan pada saat krisis ekonomi yang menyebabkan jumlah permintaan uang melebihi jumlah penawaran uang, ini artinya bank-bank dan lembaga keuangan non bank mengalami kehabisan likuiditas. Apabila suatu negara dilanda krisis ekonomi, akibat yang ditimbulkan adalah penurunan Produk Domestik Bruto (PDB), pengeringan likuiditas, dan harga-harga naik (inflasi) atau menurun (deflasi). Sebuah krisis ekonomi dapat berbentuk resesi atau depresi. Penurunan (resesi) dan peningkatan (ekspansi) PDB dan juga PDB tetap (steady-state) adalah bagian dari siklus ekonomi Perbedaan antara resesi dan depresi hanya terletak pada jangka waktu atau lamanya krisis tersebut berlangsung.⁴

Salah satu faktor terjadinya krisis keuangan Eropa adalah krisis keuangan yang terjadi di negara Irlandia. Krisis ini berawal dari Yunani yang kemudian merembet ke Irlandia dan Portugal. Krisis keuangan Eropa berawal dari defisit anggaran pemerintah yang semakin besar di negara-

⁴Tambunan, Tulus, 2011, Memahami Krisis: Siasat Membangun Kebijakan Ekonomi LP3ES, Jakarta.

negara kawasan Eropa yaitu Yunani, Irlandia, dan Portugal. Krisis disebabkan oleh defisit anggaran pemerintah dibarengi dengan rasio hutang per PDB yang menyebabkan kemampuan memperoleh pembiayaan defisit terbatas. Tidak berfungsinya kebijakan moneter dalam kawasan Euro dan terbatasnya ruang gerak fiskal mendorong perlambatan bahkan penurunan perekonomian pada beberapa negara kawasan Eropa. Krisis keuangan Eropa dikhawatirkan dapat melebar tidak hanya di kawasan Eropa bahkan global. Proses menyebarnya krisis keuangan Eropa diperkirakan bersumber dari sistem perbankan yang saling berkaitan dalam kawasan Eropa maupun dengan luar kawasan Eropa seperti Amerika dan Jepang. Dengan demikian, pada saat satu Negara mengalami default atau gagal membayar hutangnya, maka akan mempengaruhi perbankan negara lain.

Uni Eropa membutuhkan suatu kebijakan yang bekerjasama dengan Negara- Negara yang terkena krisis dalam menghadapi dampak krisis global. Beberapa kebijakan Uni Eropa dalam menanggulangi krisis yang terjadi di Negara- Negara yang terkena krisis adalah dengan membentuk suatu mekanisme yang dapat membantu keluar dari krisis yang terjadi. Selain itu dibutuhkan konsistensi dari Negara yang terkena krisis dengan membuat kebijakan yang dapat menjaga market confidence, mendorong sektor eksternal, memperkuat investasi dan meningkatkan penajaman anggaran pembelajaan negaranya. Kepercayaan Pasar

dilakukan antara lain dengan menjaga stabilitas moneter, nilai tukar, dan keberlanjutan fiskal sehingga menjadi daya tarik bagi investor.

Sektor eksternal dapat didorong dengan meningkatkan diversifikasi pasar ekspor, meningkatkan daya saing produk di pasar global dan domestik, menguatkan pasar dalam negeri, meningkatkan nilai tambah produk ekspor, Dari sisi anggaran pemerintah perlu dilakukan penajaman dan peningkatan penyerapan anggaran sehingga dapat memberi dampak optimum terhadap perekonomian.

Irlandia adalah salah satu Negara yang memakai Euro sebagai mata uangnya. Sampai pada tahun 2007 Irlandia yang tergabung dalam zona Euro masih merasakan pertumbuhan ekonomi yang memuaskan. Pertumbuhan ekonomi Irlandia cukup tinggi untuk skala Eropa sekitar, 5,0%. Sampai 2008, sekitar 6,5 Namun aktivitas ekonomi dalam negeri menurun sejak terjadinya krisis keuangan global pada tahun 2008 dimana hal ini juga berdampak pada perekonomian Irlandia.⁵

Irlandia yang terkena dampak dari krisis pun mau tidak mau harus meminta bantuan pada Uni Eropa dalam membantu menanggulangi krisis yang terjadi di Negaranya. Defisit anggaran belanja yang meningkat di Irlandia membuat Uni Eropa melakukan berbagai upaya dan kebijakan untuk menyelamatkan perekonomian Irlandia dari kebangkrutan. Demi menjaga stabilitas wilayahnya, Uni Eropa berusaha membantu dalam menanggulangi dan memulihkan ekonomi yang ada di Irlandia.

⁵ Krisis Irlandia, <http://rimanews.com>

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

“Apa peranan yang dilakukan Uni Eropa dalam perekonomian Irlandia pada tahun 2004-2014?”

C. Kerangka Pemikiran

Suatu penelitian pasti harus memiliki teori-teori atau konsep-konsep yang akan digunakan dalam menganalisa persoalan yang ada. Maka seorang peneliti haruslah menggunakan teori-teori maupun konsep-konsep tersebut, yang nantinya akan menjadi landasan ilmiah di dalam menyusun kerangka pemikiran. Adapun teori-teori yang dipakai dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Organisasi Internasional

Definisi Organisasi Internasional menurut Teuku May Rudy dalam buku: “*Administrasi dan Organisasi Internasional*” adalah sebagai berikut:

“Organisasi Internasional adalah pola kajian kerjasama yang melintasi batas-batas Negara dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati

bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antar sesama kelompok non pemerintah pada Negara yang berbeda”.⁶

Selanjutnya Teuku May Rudy menegaskan bahwa peran Organisasi Internasional adalah sebagai berikut:

- a) Wadah atau forum untuk menggalang kerjasama serta untuk mengurangi intensitas konflik antar sesama anggota.
- b) Sebagai sarana perundingan untuk menghasilkan keputusan bersama yang saling menguntungkan dan ada kalanya bertindak sebagai Lembaga yang mandiri untuk melaksanakan kegiatan yang diperlukan (antara lain, kegiatan social kemanusiaan, bantuan untuk pelestarian lingkungan hidup, pemugaran monumen bersejarah, *peace keeping*, operation, dan lain-lain).⁷

Sedangkan fungsi Organisasi Internasional menurut T. May Rudy adalah:

1. Tempat berhimpun bagi Negara – Negara anggota bila Organisasi Internasional itu IGO (antar Negara/Pemerintah) dan bagi kelompok masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat apabila Organisasi Internasional masuk kategori INGO (Non Pemerintah)
2. Untuk menyusun atau merumuskan agenda bersama (yang menyangkut kepentingan semua anggota) dan memprakarsai berlangsungnya perundingan untuk menghasilkan perjanjian-perjanjian Internasional.

⁶ T. May Rudy, *Administrasi dan Organisasi Internasional*, Bandung, Refika Aditama, 2005, hal 3

⁷ *Ibid*

3. Untuk menyusun dan menghasilkan kesepakatan mengenai aturan/norma atau rejim Internasional.
4. Penyediaan saluran untuk berkomunikasi di antara sesama anggota dan ada kalanya merintis akses komunikasi bersama dengan non anggota bisa dengan negara lain yang bukan Negara anggota dan bisa dengan Organisasi Internasional lainnya.
5. Penyebarluasan informasi yang bisa dimanfaatkan sesama anggota.⁸

Sesuai dengan peran organisasi internasional, yakni, sebagai wadah untuk menentukan keputusan yang saling menguntungkan bagi negara-negara anggota. Karena itu, Uni Eropa sebagai organisasi internasional tidak ingin permasalahan yang terjadi di Irlandia menyebar ke negara anggota Uni Eropa lainnya. Untuk itu Uni Eropa ikut mengambil keputusan dalam menyelesaikan krisis ekonomi yang melanda Irlandia agar tidak merugikan Uni Eropa.

2. Decision making process (Rational choice)

Masalah suatu Negara tidak dapat dipisahkan dari Organisasi regional yang menaungi Negara tersebut. Organisasi yang berifat kawasan mempunyai kewajiban untuk membantu dan mencegah efek dari satu Negara yang mempunyai masalah serta berdampak pada Negara lain.

⁸ *ibid.* hal. 27-28

Dalam organisasi internasional terdapat berbagai cara dalam pengambilan keputusan. Menurut Allison & Zeli, cara pengambilan keputusan di organisasi internasional tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Negosiasi antar pemerintah (*Intergovernmental negotiation*);
- b. Pemungutan suara terbanyak (*Majority voting*);
- c. Pemilihan rasional (*Rational choice*);
- d. Prosedur Standar Operasi (*Standard operating procedures*);
- e. Politik birokrasi (*Bureaucratic politics*).⁹

Rational choice theory atau teori pilihan rasional dalam ilmu Hubungan Internasional terbentuk pada awal 1960-an. Teori ini diartikan sebagai alat atau instrument untuk mencapai maksud-tujuan atau pilihan dari tujuan-terarah suatu aktor.¹⁰

Aktor yang berperan dalam pengambilan keputusan dalam teori *rational choice* berusaha menjelaskan pilihan yang optimal bagi sang pengambil keputusan. Teori ini digunakan untuk menjawab apakah keputusan yang diambil tersebut terbaik dan dapat dikatakan berhasil untuk mencapai kepentingan dari aktor di lingkungan internasional.¹¹

⁹ Volker Rittberger & Benard Zangi, *International Organization: Polity, Politics, and Policies*(New York,Palgrave Macmillan, 2006), hal 88

¹⁰ Jackson, Robert & Geor Sorensen. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2009. Hal 297.

¹¹ Snyder, Richard C., H.W Bruck, others, *Foreign Policy Decision- Making: An Approach to the Study of International Politics*. Glencoe: Free Press, 1962. Hal 60.

Stephen M. Waltz dalam jurnalnya mengatakan:¹²

“(1) Rational choice theory is individualistic: social and political outcomes are viewed as the collective product of individual choices (or as the product of choices made by unitary actors), (2) Rational choice theory assumes that each actor seeks to maximize its “subjective expected utility.” Given a particular set of preferences and a fixed array of possible choices, actors will select the outcome that brings the greatest expected benefits, (3) The specification of actors’ preferences is subject to certain constraints: (a) an actor’s preferences must be complete (meaning we can rank order their preference for different outcomes); and (b) preferences must be transitive (if A is preferred to B and B to C, then A is preferred to C).”¹³

Pada uraian di atas terdapat tiga poin yang dijelaskan oleh Waltz mengenai teori pilihan rasional. *Pertama*, teori pilihan rasional yang bersifat individu, yaitu, hasil-hasil sosial dan politik dipandang sebagai produk kolektif atas pilihan individu (atau sebagai produk dari pilihan yang dibuat oleh aktor kesatuan). Selanjutnya, Waltz menambahkan aktor kesatuan (organisasi Internasional) pada aktor teori pilihan rasional. *Kedua*, Waltz mengasumsikan bahwa aktor berusaha memaksimalkan kepentingannya yang dilakukan oleh aktor dengan mengambil suatu pilihan yang akan membawa hasil maksimal terhadap pencapaian kepentingannya. *Ketiga*, teori pilihan rasional memfokuskan preferensi dari aktor terhadap kendala tertentu. Sebagai contoh, aktor memiliki beberapa pilihan. Waltz pada intinya menyatakan bahwa teori pilihan rasional merupakan alat untuk membuat kesimpulan logis tentang bagaimana manusia (atau negara) membuat keputusan.

¹² “Rigor or Rigor Mortis? Rational Choice and Security Studies,” MIT Press Journals, Spring

¹³ <http://mitpress.mit.edu/journals>

Dari penjelasan mengenai teori pilihan rasional tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa teori pilihan rasional merupakan alat yang mempunyai maksud dan tujuan atau pilihan terarah dari suatu organisasi untuk mencapai kepentingannya di lingkungan internasional.

Konsep *rational choice* berasumsi rasionalitas, yaitu, bahwa suatu pilihan diambil atas dasar perhitungan atau kalkulasi untung dan rugi (*cost and benefit calculation*) bukan pada pertimbangan moralitas baik buruk.

Ketika menjalankan sebuah kebijakan yang berdasarkan pada konsep *Rational Choice* ada beberapa hal yang saling berkaitan satu dan lainnya. Dengan demikian, maka keputusan dan kebijakan yang diambil oleh *unitary actor* dalam konsep *Rational Choice* dapat menjadi salah satu pendekatan analisis yang mampu mengukur keberhasilan yang dicapai dan kegagalan dari perspektif dunia internasional dan dampak yang didapat oleh dunia internasional dengan adanya intervensi dari Uni Eropa dalam pemulihan krisis yang terjadi di Irlandia.

Menurut Allison, *rational decision making model* terbentuk dari aktor kesatuan (*unitary actor*) yang menjalankan peran sebagai aktor rasional dalam pengambilan keputusan. Kebijakan tersebut menjadi sebuah langkah dalam menangani permasalahan yang dihadapi negara.¹⁴

Uni Eropa sebagai organisasi regionalisme harus memastikan Negara anggotanya menjalankan kebijakan yang tidak merugikan Uni

¹⁴ Volker Rittberger & Benard Zangi, Loc.Cit

Eropa. Hal ini karena kebijakan dari satu Negara dapat berpengaruh dan berdampak pada Negara- Negara anggota yang lain. Selain itu, Uni Eropa menjadi wadah setiap kepentingan Negara anggotanya, di mana setiap Negara anggotanya diharapkan memberikan keuntungan bagi Negara anggota dan juga kawasan di Eropa.

Pada kasus terjadinya krisis ekonomi di Irlandia terjadi suatu proses pengambilan keputusan menggunakan model *rational choice*. Model *rational choice* menjadi gambaran Uni Eropa yang turut berkepentingan dalam pemulihan perekonomian di Irlandia. Dalam model ini organisasi politik membuat keputusan dengan perhitungan yang tepat dalam menangani suatu masalah yang terjadi serta keuntungan dan kerugian dari semua kemungkinan yang ada untuk menentukan jalan mana yang harus diambil. Keputusan harus mencakup kepentingan dari organisasi itu sendiri tanpa merugikan Negara- Negara anggota yang lain. Organisasi internasional yang memiliki banyak anggota dan setiap negara anggota memiliki kepentingan nasionalnya sendiri akan membuat organisasi internasional tersebut sulit dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, solusi terbaik akan dicari demi menjaga kepentingan bersama antar anggota Uni Eropa dalam pemulihan perekonomian Irlandia tanpa mengorbankan salah satu atau sebagian anggotanya.

D. Hipotesa

Dari pembahasan di atas dapat dibuat kesimpulan sementara bahwa Uni Eropa memiliki peranan penting dalam perekonomian di Irlandia.

Terutama pada saat krisis ekonomi yang melanda Irlandia, Uni Eropa membantu dalam menagatasi krisis dengan membentuk suatu sistem yang disebut Mekanisme Stabilisasi Keuangan Eropa (EFSM) dan Fasilitas Stabilitas Keuangan Eropa (EFSF) dengan dibantu oleh Dana Moneter Internasional (IMF) , serta Bank Sentral Eropa. Kebijakan yang diambil oleh Uni Eropa ini bertujuan untuk meminimalisir krisis dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi serta bantuan dari kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah dalam penanganan pemulihan ekonomi Irlandia.

E. BATASAN PENELITIAN

Jangkauan penelitian untuk skripsi ini adalah tahun 2004 hingga tahun 2014. Rentang waktu ini dipilih karena pada tahun 2004 Irlandia masih berada pada perekonomian yang stabil akan tetapi mulai terlihat defisit anggaran dan pada tahun 2007 dan 2008 Irlandia mengalami krisis keuangan yang menyebabkan Uni Eropa harus turun tangan dalam membantu perekonomian Irlandia.

Dalam skripsi ini akan dibahas peranan Uni Eropa dalam membantu Irlandia dalam pemulihan pekonomian dan juga perkembangan perekonomiannya periode tahun 2004-2014.

F. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

1. Untuk lebih memahami dan mengaplikasikan teori hubungan internasional yang telah dipelajari selama perkuliahan.
2. Untuk menjelaskan latar belakang yang ada dan untuk membuktikan hipotesa.
3. Untuk meninjau lebih jauh tentang “Peran Uni Eropa dalam pemulihan perekonomian Irlandia 2004-2014”.
4. Untuk memenuhi salah satu persyaratan guna menempuh gelar sarjana strata-1 (satu) Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

G. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-eksploratif dengan melakukan studi kepustakaan (*library research*) yang berasal dari buku, jurnal, majalah, surat kabar, dan sumber laporan lainnya, baik cetak maupun digital. Selanjutnya, data yang diperoleh akan disusun dan dianalisis dengan kerangka dasar teori yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

H. Sistematika Penulisan

Sistematikan penyusunan skripsi ini dipaparkan sebagai berikut:

BAB I : Bab ini berisi pendahuluan yang memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, hipotesa, jangkauan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematikan penulisan.

BAB II : Bab ini membahas sejarah, penyebab krisis ekonomi, dan dampak krisis ekonomi di Irlandia tahun 2008-2014.

BAB III : Bab ini berisi tentang membahas mekanisme pengambilan keputusan dan pemberian bantuan.

BAB IV : Bab ini berisi analisis tentang peranan Uni Eropa dalam membantu pemulihan perekonomian di Irlandia dan perkembangan perekonomian di Irlandia periode 2004-2014.

BAB V : Bab ini berisi kesimpulan